BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan respons Indonesia dan Singapura dalam menangani kejahatan siber *love scamming* dengan menggunakan kerangka teori transformasi negara atau *state transformation* dan pendekatan *Most Similar System Design* (MSSD). Hasil analisis ini kemudian menunjukkan bahwa *love scamming* merupakan bentuk kejahatan siber transnasional yang berkembang seiring dengan perkembangan digitalisasi, meningkatnya penggunaan platform daring, serta keterhubungan sistem keuangan lintas negara. Karakteristik tersebut kemudian menjadikan *love scamming* sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang tidak dapat ditangani secara unilateral oleh negara, melainkan membutuhkan tata kelola keamanan yang bersifat multi-aktor, lintas sektor, dan lintas yurisdiksi.

Dalam konteks regional, ASEAN melalui mekanisme ASEAN *Plan of Action* (PoA) *in Combating Transnaional Crime* memiliki peran sebagai kerangka kebijakan kolektif yang memfasilitasi kerja sama negara anggota dalam menghadapi kejahatan transnasional, termasuk kejahatan siber dan penipuan daring. Namun, penelitian ini menemukan bahwa kerangka regional ASEAN *Plan of Action to Combat Transnational Crime* bersifat koordinatif dan non-koersif, sehingga implementasinya sangat bergantung pada kapasitas institusional dan mekanisme tata kelola keamanan di tingkat nasional masing-masing negara.

Hasil komparasi tersebut kemudian menunjukkan bahwa Singapura memiliki tingkat internalisasi kerangka regional yang relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Singapura mampu menerjemahkan komitmen regional ke dalam kebijakan nasional yang terintegrasi melalui koordinasi erat antara aparat penegak hukum, lembaga keuangan, regulator, dan sektor swasta. Pendekatan ini mencerminkan praktik dari *state transformation* yang matang, ditandai oleh distribusi peran yang jelas, pertukaran informasi yang cepat, serta pemanfaatan teknologi dalam pencegahan dan penindakan *love scamming*.

Sebaliknya, respons Indonesia terhadap kejahatan siber *love scamming* masih menunjukkan karakteristik tata kelola keamanan yang fragmentif. Meskipun Indonesia aktif dalam forum SOMTC (*Senior Officials Meeting on Transnational Crime*) dan memiliki berbagai instrumen kebijakan serta institusi terkait, koordinasi antarlembaga masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan efektivitas penanganan kasus *love scamming*, khususnya dalam aspek pelacakan aliran dana lintas negara, penegakan hukum, dan perlindungan korban.

Melalui pendekatan MSSD, penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan efektivitas respons Indonesia dan Singapura tidak disebabkan oleh perbedaan konteks regional atau jenis ancaman saja, melainkan oleh variasi dalam kapasitas distribusi peran dan pembagian kewenangan yang tepat. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi argumen utama dari teori *state transformation* bahwa keberhasilan penanganan ancaman keamanan non-tradisional sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengoordinasikan aktor, kebijakan, dan institusi secara efektif, bukan semata-mata oleh keberadaan kerangka kebijakan regional.

5.2 Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang membuka ruang bagi pengembangan kajian di masa mendatang. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan studi dengan memasukkan lebih banyak negara anggota ASEAN untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi implementasi ASEAN *Plan of Action to Combat Transnational Crime* dalam menangani kejahatan siber. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan empiris yang lebih mendalam, seperti wawancara dengan pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, atau lembaga keuangan, guna menggali dinamika implementasi kebijakan secara lebih rinci.

Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji aspek perlindungan korban *love scamming* dari perspektif hak asasi manusia atau ekponomi politik, mengingat dampak dari kejahatan ini tidak hanya bersifat keamanan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Dengan demikian, kajian lanjutan diharapkan dapat memperkaya

diskursus akademik mengenai tata kelola keamanan siber seta memberikan kontribusi yang lebih luas bagi perumusan kebijakan publik di tingkat nasional maupun regional.